



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 16 a TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 no. 59, tambahan lembaran Negara no. 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT/140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2012, tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;

5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume Penyaluran Pupuk;
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang;
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
14. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri;
15. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda;
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya

- pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
 20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten;
 21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, dan sub sektor seperti pada Lampiran I;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati seperti pada Lampiran II dan Lampiran III;

- 
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan;
 - (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - (6) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan;
 - (7) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kabupaten, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PANYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani di atur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
- Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg;
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 kg;
- Pupuk SP-36	= 50 kg;
- Pupuk ZA	= 50 kg;
- Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg;
- Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg;

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh penyuluhan.

Pasal 12

- (1) KPPP di kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

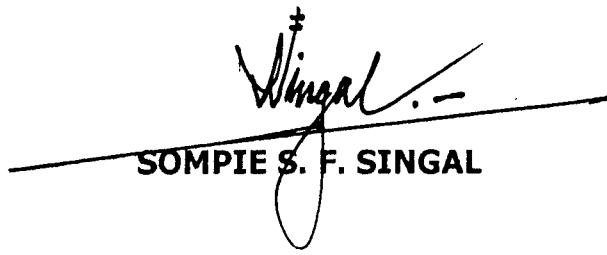
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan perkebunan Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *18*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 23 Februari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA

Singal 
SOMPIE S. F. SINGAL

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Rumambi
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR : 16 a

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 16 a Tahun 2012
TANGGAL : 23 Februari 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SUB SEKTOR	JENIS-JENIS PUPUK			
		UREA (TON)	SP-36 (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1	TANAMAN PANGAN	1411	333	1163	10
2	PERKEBUNAN	502	40	279	0
3	HORTIKULTURA	67	13	36	80
4	PETERNAKAN	16	1	0	2
5	PERIKANAN	204	39	0	0
JUMLAH		2200	426	1478	266

BUPATI MINAHASA UTARA

SOMPIE S. F. SINGAL

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
MENURUT SEBARAN PER BULAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

JENIS PUPUK: UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	KEMA	217.3	14.9	18.4	20.4	23.5	20.9	14.2	18.2	14.2	39	4.5	9.7	
2	KAUDITAN	236.3	16.9	20.4	21.4	22.4	24.5	22.9	16.2	20.2	16.2	39	5.5	10.7
3	AIRMADIDI	218.8	15.9	18.4	20.9	23.5	21.9	14.2	18.7	15.2	35	4.5	10.7	
4	KALAWAT	208.8	14.9	17.4	18.9	19.9	22.5	20.9	13.2	17.7	14.2	34	4.5	10.7
5	DIMEMBE	271.3	19.9	23.4	24.9	24.4	28.5	25.9	17.7	23.2	20.2	41	7.5	14.7
6	TALAWAAN	279.3	20.9	23.4	25.9	26.4	26.5	26.9	18.7	24.2	20.2	41	7.5	15.7
7	LIKUPANG BARAT	201.3	12.9	16.4	17.4	22.4	24.5	17.9	12.2	15.2	10.2	40	4.5	7.7
8	LIKUPANG TIMUR	201.3	12.9	16.4	17.4	22.4	24.5	17.9	12.2	15.2	10.2	40	4.5	7.7
9	LIKUPANG SELATAN	180.3	10.9	13.4	14.4	19.4	21.5	14.9	10.2	14.2	10.2	40	4.5	6.7
10	WORI	185.3	11.9	15.4	15.4	19.4	21.5	15.9	10.2	14.2	10.2	40	4.5	6.7
	JUMLAH	2200	152	183	195	218	243	206	139	181	141	389	52	101

JENIS PUPUK: SP-36

-2

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									DES	
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	
1	KEMA	44.2	4.2	3.2	2.4	2.4	1.4	1.4	1.2	2.4	9.4	7.5	7.5
2	KAUDITAN	54.4	5.4	4.2	3.1	3.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.6	10.6	8.7
3	AIRMADIDI	46.4	4.4	3.2	2.6	2.6	1.6	1.6	1.4	1.4	2.6	9.6	7.7
4	KALAWAT	37.9	3.4	2.2	2.1	2.1	1.1	1.1	0.9	0.9	2.1	8.6	6.7
5	DIMEMBE	56.9	5.4	4.2	3.1	3.1	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	10.6	9.7
6	TALAWAAN	66.4	6.4	5.2	4.1	4.1	3.1	3.1	2.9	2.9	3.6	11.6	9.7
7	LIKUPANG BARAT	30.7	2.2	1.2	1.9	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	1.9	7.4	5.5
8	LIKUPANG TIMUR	29.7	2.2	1.2	1.9	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	1.9	6.4	5.5
9	LIKUPANG SELATAN	29.7	2.2	1.2	1.9	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	1.9	6.4	5.5
10	WORI	29.7	2.2	1.2	1.9	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	1.9	6.4	5.5
	JUMLAH	426	38	27	25	25	15	15	13	13	24	87	72

JENIS PUPUK: ZA

III-3

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
2	KAUDITAN	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
3	AIRMADIDI	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
4	KALAWAT	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
5	DIMEMBE	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
6	TALAWAAN	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
7	LIKUPANG BARAT	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
8	LIKUPANG TIMUR	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
9	LIKUPANG SELATAN	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
10	WORI	1.3	0.1	0.1	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
	JUMLAH	13	1	1	1	5	0	5	0	0	0	0

JENIS PUPUK: NPK

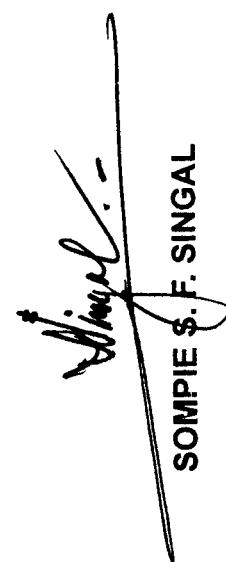
-4

JENIS PUPUK: ORGANIK

III-5

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	30	3.3	4	3.2	1.5	3	3	2.6	1.5	2	2
2	KAUDITAN	31	3.3	4	3.2	1.5	3	3.5	2.6	1.5	2.5	2
3	AIR MADIDI	24.5	3.3	3	2.2	1.5	2	2	2.6	1	2	2
4	KALAWAT	23.5	2.3	3	2.2	1.5	2	2	2.6	1	2	2
5	DIMEMBE	37	5.3	6	5.2	1.5	3	3	2.6	1.5	2	2
6	TALAWAAN	44	6.3	7	5.2	1.5	4	4.5	3.6	1.5	2.5	2
7	LIKUPANG BARAT	19	1.3	2	1.2	1.5	2	2	1.6	1	2	1.5
8	LIKUPANG TIMUR	19	1.3	2	1.2	1.5	2	2	1.6	1	2	1.5
9	LIKUPANG SELATAN	19	1.3	2	1.2	1.5	2	2	1.6	1	2	1.5
10	WORI	19	1.3	2	1.2	1.5	2	2	1.6	1	2	1.5
	JUMLAH	266	29	35	26	15	25	26	23	12	21	18
											20	16

BUPATI MINAHASA UTARA



SOMPIE S. F. SINGAL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERBATAS DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN**

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANI
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)								
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT
1	KEMA	51	0	2	0	11	13	0	0	0	25
2	KAUDITAN	49	0	2	0	11	12	0	0	0	24
3	AIRMAIDI	42	0	1	0	10	11	0	0	0	20
4	KALAWAT	42	0	1	0	10	11	0	0	0	20
5	DIMEMBE	45	0	1	0	10	12	0	0	0	22
6	TALAWAAN	46	0	1	0	11	12	0	0	0	22
7	LIKUPANG BARAT	57	0	2	0	13	14	0	0	0	28
8	LIKUPANG TIMUR	57	0	2	0	13	14	0	0	0	28
9	LIKUPANG SELATAN	56	0	1	0	13	14	0	0	0	28
10	WORI	57	0	2	0	13	14	0	0	0	28
	JUMLAH	502	0	15	0	115	127	0	0	0	245

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)								
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT
1	KEMA	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
2	KAUDITAN	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
3	AIRMADIDI	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
4	KALAWAT	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
5	DIMEMBE	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
6	TALAWAAN	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
7	LIKUPANG BARAT	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
8	LIKUPANG TIMUR	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
9	LIKUPANG SELATAN	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
10	WORI	1.6	0	0.6	0	0	0.5	0	0	0.5	0
	JUMLAH	16	0	6	0	0	5	0	0	5	0

11/11

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: UREA	NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)										DES
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	
1	KEMA	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
2	KAUDITAN	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
3	AIRMADIDI	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
4	KALAWAT	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
5	DIMEMBE	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
6	TALAWAAN	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
7	LIKUPANG BARAT	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
8	LIKUPANG TIMUR	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
9	LIKUPANG SELATAN	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
10	WORI	6.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7
	JUMLAH	67	9	8	4	4	5	4	2	2	2	5	5	17

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA 2012**

JENIS PUPUK: UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									DES	
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV
1	KEMA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	KAUDITAN	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	AIMADIDI	21,5	2	2	1,5	1,5	2	2	1	1,5	2	2	2
4	KALAWAT	21,5	2	2	1,5	1,5	2	2	1	1,5	2	2	2
5	DIMEMBE	40	3	3	2,5	3	4	3	2,5	3	4	4	4
6	TALAWAAN	37	3	3	2,5	3	3	3	2,5	3	3	3	4
7	LIKUPANG BARAT	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	LIKUPANG TIMUR	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	LIKUPANG SELATAN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	WORI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	204	17	17	15	16	18	17	14	16	18	19	19

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: SP-36

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 (SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012

JENIS PUPUK: SP-36

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	KAUDITAN	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	AIRMADIDI	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
4	KALAWAT	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	DIMEMBE	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6	TALAWAAN	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	LIKUPANG BARAT	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	LIKUPANG TIMUR	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	LIKUPANG SELATAN	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	WORI	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	JUMLAH	40	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

IENS PIPLIK · SP-36

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)**
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012

JENIS PUPUK: SP-36

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	KAUDITAN	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	AIRMADIDI	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	KALAWAT	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	DIMEMBE	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	TALAWAAN	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	LIKUPANG BARAT	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	LIKUPANG TIMUR	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	LIKUPANG SELATAN	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	WORI	1,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	JUMLAH	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: SP-36

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	KEMA	2.8	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
2	KAUDITAN	5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
3	AIRMADIDI	5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
4	KALAWAT	5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
5	DIMEMBE	5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
6	TALAWAAN	5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
7	LIKUPANG BARAT	2.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
8	LIKUPANG TIMUR	2.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
9	LIKUPANG SELATAN	2.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
10	WORI	2.8	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
	JUMLAH	39	2	1	2	4	4	4	2	2	4	4	5	5

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: NPK

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: NPK

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	30	0	4	0	9	0	0	11	0	0	6
2	KAUDITAN	32	0	4	0	10	0	0	12	0	0	6
3	AIRMADIDI	21.5	0	2	0	7	0	0	8	0	0	4.5
4	KALAWAT	20.5	0	2	0	7	0	0	7	0	0	4.5
5	DIMEMBE	25	0	3	0	8	0	0	9	0	0	5
6	TALAWAAN	25	0	3	0	8	0	0	9	0	0	5
7	LIKUPANG BARAT	32.5	0	4	0	10	0	0	12	0	0	6.5
8	LIKUPANG TIMUR	30.5	0	4	0	9	0	0	11	0	0	6.5
9	LIKUPANG SELATAN	30	0	4	0	9	0	0	11	0	0	6
10	WORI	32	0	4	0	10	0	0	12	0	0	6
	JUMLAH	279	0	34	0	87	0	0	102	0	0	56

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: NPK

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: NPK		KEBUTUHAN PUPUK (TON)																																			
NO	KECAMATAN	TOTAL	JAN			FEB			MAR			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGT			SEPT			OKT			NOV			DES	
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES																							
1	KEMA	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
2	KAUDITAN	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
3	AIRMAIDI	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
4	KALAWAT	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
5	DIMEMBE	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
6	TALAWAAN	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
7	LIKUPANG BARAT	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
8	LIKUPANG TIMUR	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
9	LIKUPANG SELATAN	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
10	WORI	3.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5																							
	JUMLAH	36	4	3	3	2	2	2	2	2	4	4	3	5																							

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)**

JENIS PUPUK: NPK

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 (SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012

JENIS PUPUK: ZA

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
2	KAUDITAN	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
3	AIMADIDI	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
4	KALAWAT	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
5	DIMEMBE	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
6	TALAWAAN	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
7	LIKUPANG BARAT	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
8	LIKUPANG TIMUR	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
9	LIKUPANG SELATAN	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
10	WORI	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
	JUMLAH	10	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JĒNIS PUPUK: ZA

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)**
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012

JENIS PUPUK: ZA

NO	KECAMATAN	TOTAL	KEBUTUHAN PUPUK (TON)								
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT
1	KEMA	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
2	KAUDITAN	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
3	AIRMADIDI	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
4	KALAWAT	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
5	DIMEMBE	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
6	TALAWAAN	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
7	LIKUPANG BARAT	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
8	LIKUPANG TIMUR	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
9	LIKUPANG SELATAN	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	WORI	0.3	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0

m

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

JENIS PUPUK: ZA

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

NO	JENIS PUPUK: ORGANIK KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)										DES	
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	
1	KEMA	22	3	3	3	1	2	2	2	1	1	1	2	1
2	KAUDITAN	22	3	3	3	1	2	2	2	1	1	1	2	1
3	AIRMADIDI	16,5	3	2	2	1	1	1	2	0,5	1	1	1	1
4	KALAWAT	15,5	2	2	2	1	1	1	2	0,5	1	1	1	1
5	DIMEMBE	29	5	5	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2
6	TALAWAAN	35	6	6	5	1	3	3	3	1	1	1	3	2
7	LIKUPANG BARAT	11	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1
8	LIKUPANG TIMUR	11	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1
9	LIKUPANG SELATAN	11	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1
10	WORI	11	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1
	JUMLAH	184	26	25	24	10	15	15	17	7	10	8	15	12

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012**

NO	JENIS PUPUK: ORGANIK	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	KEMA		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
2	KAUDITAN		8.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1.5	0.6	0.5	1.5	1	0.5	0.4
3	AIRMAIDI		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
4	KALAWAT		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
5	DIMEMBE		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
6	TALAWAAN		8.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1.5	0.6	0.5	1.5	1	0.5	0.4
7	LIKUPANG BARAT		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
8	LIKUPANG TIMUR		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
9	LIKUPANG SELATAN		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
10	WORI		7.8	0.3	0.8	0.2	0.5	1	1	0.6	0.5	1	1	0.5	0.4
	JUMLAH		80	3	8	2	5	10	11	6	5	11	10	5	4

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 (SUB SEKTOR PERIKANAN)
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TA. 2012

JENIS PUPUK ORGANIK

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)									
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	KEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KAUDITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AIRMADIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KALAWAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DIMEMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TALAWAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LIKUPANG BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	LIKUPANG TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LIKUPANG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	WORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI MINAHASA UTARA

SOMPIE S. F. SINGAL